



KINERJA APARATUR DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA DI SUKAMARGA KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT

Deni Rahmawan¹, Anwar², M. Herowandi³

¹Universitas Tulang Bawang, Indonesia

²Universitas Tulang Bawang, Indonesia

³Universitas Tulang Bawang, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 03, 14, 2026

Revised 04, 17, 2026

Accepted 05, 13, 2026

Kata Kunci:

Kinerja

Aparatur Desa

Kemandirian Desa

ABSTRAK

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah camat dan menjadi unit pemerintahan pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa Sukamarga di Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat, berupaya mewujudkan desa mandiri melalui pengelolaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, serta penataan sumber daya aparatur. Kinerja aparatur desa menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan desa secara efektif dan efisien, sementara kemandirian desa dimaknai sebagai kemampuan desa dalam mengelola, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Desa Sukamarga Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Kinerja aparatur desa diukur berdasarkan indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas menurut Budi Setiawan dan Ahmad Farhani (2019), sedangkan kemandirian desa diukur melalui kemampuan desa mengatur rumah tangganya, mengelola pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, mengutamakan aspirasi dan partisipasi masyarakat, serta mengelola sumber daya secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan teori Agusta Ivanovitsky dan Pujiyanto (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur Desa Sukamarga pada seluruh indikator telah dilaksanakan dengan baik dan berkontribusi positif terhadap terwujudnya kemandirian desa, yang tercermin dari kemampuan desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya desa secara transparan dan bertanggung jawab.



Corresponding Author:

Deni Rahmawan

Universitas Tulang Bawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Indonesia

Email: denirhmawan03@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, ditandai dengan meningkatnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, menuntut profesionalitas aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Aparatur pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan terendah memiliki peran strategis sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat, sehingga dituntut mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal (HAW, 2003).

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah camat dan menjadi unit pemerintahan pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional (Wahyu, 2001). Penguatan posisi desa semakin nyata dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih luas kepada desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini memperkuat status desa sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari proses desentralisasi pemerintahan (Wida, 2017). Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai bagian dari birokrasi negara sekaligus pemimpin lokal dalam menciptakan kehidupan demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat,

serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Dwipayana, 2003; Joni, 2012).

Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam menggali dan mengelola potensi desa serta menerapkan manajemen kinerja yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja berfungsi sebagai proses pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal melalui pengawasan, penilaian, dan peningkatan kinerja aparatur (Ibrahim, 1985). Dalam konteks ini, Desa Sukamarga Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat sedang berupaya mewujudkan kemandirian desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya mewujudkan kemandirian desa menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan nasional dan peningkatan status desa (Efrilianto, 2022; Lisnawati, 2019). Oleh karena itu, kinerja aparatur desa menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kemandirian desa, khususnya di Desa Sukamarga Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja aparatur desa dalam upaya mewujudkan kemandirian desa di Sukamarga Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat & untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat kinerja aparatur desa dalam upaya mewujudkan kemandirian desa di Sukamarga Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian terdahulu: (1) Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, oleh (Rahmawati Anisa Dwi

dan Didik G. Suharto, 2024). Perbedaan: Pada penelitian ini memiliki perbedaan dari segi judul, lokasi penelitian dan objek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Wonogiri, serta solusi dalam menghadapi problematika aspek yang perlu ditingkatkan pada digitalisasi, sedangkan penelitian penulis fokus pada kinerja aparatur desa dan lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian terdahulu: (2) Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Suatu Tinjauan Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek) oleh Andri Wahyudi, 2022. Perbedaan: Pada penelitian ini memiliki perbedaan dari segi judul, lokasi penelitian dan hasil penelitian. Penelitian terdahulu penelitiannya dilakukan di Ngadi Suko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sedangkan penelitian penulis dilakukan di Sukamarga Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Fokus dari penelitian ini ialah pada Pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Aparatur Desa, sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada kinerja aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa.

Penelitian terdahulu: (3) Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Serumpun Pauh Kabupaten Kerinci, oleh Emilya Gusmita, 2023. Perbedaan: Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu dari segi judul, lokasi penelitian dan kegiatan pemerintahan desa. Pada penelitian terdahulu berfokus perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan aparatur desa, sedangkan penelitian penulis fokus pada perwujudan kemandirian desa oleh aparatur desa.

Penelitian terdahulu: (4) Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba, oleh Andi Ahmad Malikul Afdal, 2022. Perbedaan: Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu dari segi judul, lokasi penelitian dan kegiatan pemerintahan desa,

dimana pada penelitian terdahulu berfokus pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dengan menganalisis kualitas pelayanan yang diterapkan, sedangkan penelitian penulis fokus pada kinerja aparatur dalam mewujudkan kemandirian desa.

Penelitian terdahulu: (5) Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan publik Pada Kantor Desa sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, oleh Melli Puspita Lestari, 2022. Perbedaan: Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu dari segi judul, lokasi penelitian dan kegiatan pemerintahan desa, dimana pada penelitian terdahulu berfokus pada kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan pelayanan publik, sedangkan penelitian penulis fokus pada kinerja aparatur dalam upaya mewujudkan kemandirian desa.

METODE

Metode Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Aparatur Desa dalam upaya mewujudkan kemandirian Desa di Desa Sukamarga, Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat. Subjek Penelitian pada penelitian ini adalah informan dan informan kunci. Sumber data diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sukamarga termasuk kampung muda yang ada di Marga Bengkunt, yang telah dihuni oleh beberapa keluarga sejak tahun 1921, jauh sebelum zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sukamarga ini dulu bermula pada dusun Susukan Sukanegeri, penduduknya pun awal mula terdiri dari beberapa keturunan nenek moyang. Pada Tahun 1972 Pekon ini menjadi sebuah kampung, yang mengikuti pemerintahan dengan kepala kampung yang pertama, adalah Bapak Afandi Husin. Desa Sukamarga, dalam

perjalannya telah dipecah atau mengalami perkembangan menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Pemerihan dan Desa Sukamarga sebagai Desa induk.

Kinerja Aparatur Desa. Produktivitas. Konsep produktivitas merupakan pengukuran hasil sesuai yang diharapkan, oleh sebab itu dalam penelitian ini produktivitas diukur melalui dimensi hasil kerja yang optimal dengan sumber daya yang ada. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan disimpulkan bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah bekerja dengan baik, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan menghasilkan capaian kerja yang optimal.

Kualitas Pelayanan. Tingkat kepuasan rakyat pada suatu bentuk pelayanan mempengaruhi capaian kinerja organisasi itu sendiri. Jika mencari tahu tentang kepuasan pada sebuah kualitas dari pelayanan biasanya ditemukan pada tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat. Kualitas pelayanan cenderung dipengaruhi oleh perilaku dan akses pelayanan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini kualitas pelayanan diukur melalui dimensi keramahan, kejelasan informasi, dan kemudahan akses layanan. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan disimpulkan bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah memberikan informasi jelas, dan adanya kemudahan akses layanan. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggungjawab pemberian pelayanan dilakukan dengan membagi jadwal piket, adanya informasi yang jelas (ada papan alur pelayanan), akan tetapi masih ada hambatan terkait disiplin petugas yang belum mentaati jam kerja dan jadwal piket tersebut dengan baik, sehingga masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang dilayani. Namun secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan aparatur desa sudah baik.

Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjuk pada

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu dalam penelitian ini responsivitas diukur melalui dimensi ketepatan dan kecepatan dalam merespon kebutuhan. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan disimpulkan bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah memberikan respon yang tepat dan cepat atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas adalah kesesuaian kewenangan pelaksanaan kegiatan program-program organisasi dengan prosedur administrasi atau peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada. Oleh sebab itu dalam penelitian ini responsivitas diukur melalui dimensi komitmen terhadap tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan disimpulkan bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah berkomitmen tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Akuntabilitas. Pola akuntabilitas bisa dipakai dalam memandang sejauh mana arah perjalanan institusi publik selaras pada keinginan masyarakat dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, dan pemerintah harus transparan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan, sesuai dengan azas dan norma yang tumbuh di tengah rakyat. Oleh sebab itu dalam penelitian ini responsivitas diukur melalui dimensi mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan transparan. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan disimpulkan bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah bekerja dengan transparan (terbuka), dan

bertanggungjawab dalam setiap tindakan. Hasil wawancara terkait dengan kinerja aparatur desa bila dilihat dari teori kinerja yang dikemukakan oleh Budi Setiawan dan Ahmad Farhani bahwa indikator penilaian kinerja diukur melalui produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas, maka indikator ukuran-ukuran tersebut sudah dijalankan dengan baik.

Kemandirian Desa. Kemampuan Desa Mengatur Rumahtangganya. Kemandirian desa adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah desa untuk mengatur rumahtangganya sendiri. Oleh sebab itu dalam penelitian ini kemampuan desa mengatur rumahtangganya diukur melalui dimensi adanya regulasi atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh desa. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan disimpulkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya, desa Sukamarga berpedoman pada regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya tentang pedoman teknis pelaksanaan.

Mengatur Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Kemandirian desa adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah desa untuk mengatur pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini kemampuan mengatur pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat diukur melalui dimensi rencana pembangunan dan kesesuaian kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan disimpulkan bahwa desa Sukamarga telah menyusun rencana pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat.

Mengutamakan Aspirasi Dan Partisipasi Masyarakat. Kemandirian desa adalah kemampuan dalam pengelolaan pembangunan mengutamakan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu dalam penelitian ini kemampuan mengutamakan aspirasi dan partisipasi

masyarakat diukur melalui dimensi keterlibatan masyarakat melalui aspirasi dan partisipasi dalam kegiatan penyusunan program pembangunan. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan disimpulkan bahwa desa Sukamarga dalam menyusun rencana pembangunan dan program-program pembangunan desa sesuai aspirasi dengan melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur (LHP, tokoh masyarakat, agama, pemuda dll) dan masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Mengelola Sumber Daya Dengan Optimal, Transparan dan Tanggungjawab. Kemandirian desa adalah kemampuan pemerintah desa mengelola sumber daya dengan optimal, transparan dan tanggungjawab. Oleh sebab itu dalam penelitian kemampuan mengelola sumber daya dengan optimal, transparan dan tanggungjawab diukur melalui dimensi mengelola sumber daya (dana dan aset) desa secara transparan (terbuka) dan sesuai peraturan. Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan disimpulkan bahwa desa Sukamarga dalam pengelolaan dana desa dan aset desa telah dilakukan transparan, sesuai peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil wawancara terkait dengan kemandirian desa bila dilihat menurut teori yang dikemukakan oleh Agusta Ivanovitsky dan Pujiyanto (2014), bahwa indikator kemandirian desa: kemampuan desa mengatur rumahtangganya, Mengatur pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, Mengutamakan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan Mengelola sumber daya dengan optimal, transparan dan tanggungjawab, maka indikator ukuran-ukuran tersebut sudah terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Sukamarga Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, disimpulkan bahwa:

1. Kinerja aparatur desa yang diukur melalui indikator Produktivitas:

bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah bekerja dengan baik, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan menghasilkan capaian kerja yang optimal. Indikator Kualitas pelayanan: walaupun masih ada hambatan terkait disiplin kerja beberapa aparatur desa yang masih kurang dalam mentaati jam kerja dan jadwal piket, namun secara keseluruhan bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah memberikan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang baik, informasi jelas, dan adanya kemudahan akses layanan. Indikator Responsivitas: bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah memberikan respon yang tepat dan cepat atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Indikator Responsibilitas: bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah berkomitmen tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang. Indikator Akuntabilitas: bahwa aparatur desa dalam mewujudkan kemandirian desa telah bekerja dengan transparan (terbuka), dan bertanggungjawab dalam setiap tindakan.

2. Kemandirian desa yang diukur melalui indikator Kemampuan desa mengatur rumahtangganya: bahwa desa Sukamarga berpedoman pada regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya tentang pedoman teknis pelaksanaan. Indikator Mengatur pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat: bahwa desa Sukamarga telah menyusun rencana pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Indikator Mengutamakan aspirasi dan partisipasi masyarakat: bahwa desa Sukamarga dalam menyusun rencana pembangunan dan program-program pembangunan desa sesuai aspirasi dengan melalui musyawarah desa dan masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkannya. Indikator Mengelola sumber daya dengan optimal, transparan dan tanggungjawab: bahwa desa Sukamarga dalam pengelolaan dana desa dan aset desa telah dilakukan transparan, sesuai peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Hasil penelitian terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Sukamarga Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat, masih ada hambatan dalam hal disiplin kerja aparatur desa.

REFERENSI

- Abdul Fattah Nasution. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Agusta Ivanovich, Fujiartanto. (2014). Indeks Kemandirian Desa :Metode Hasil dan Alokasi Program Pembangunan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Andi Ahmad Malikul Afdal. (2022). Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba. Buletin Poltanesa, 23(2)2.
- Danuri dan Siti Maisaroh. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan. Penerbit Samudra Biru.
- Ibrahim, L. (1985). Pengertian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen. Ghalia Indonesia.
- Kansil, C. (2019). Hukum Administrasi Daerah. Jala Permata Aksara.
- Moleong, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Priansa. (2019). Manajemen Kinerja Kepegawaian Dalam Pengelolaan SDM Perusahaan. Pustakan Setia.
- Sidik Priadana dan Denok Surnasih. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Pascal Books Redaksi.
- Sinambela. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. Bumi Aksara.
- Abdul Fattah Nasution. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Agusta Ivanovich, Fujiartanto. (2014). Indeks Kemandirian Desa :Metode Hasil dan Alokasi Program Pembangunan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Andi Ahmad Malikul Afdal. (2022). Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah

- Towa Kabupaten Bulukumba. Buletin Poltanesa, 23(2)2.
- Andri wahyudi. (2022). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Suatu Tinjauan Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 34.
- Budi Setiawan, Ahmad Farhani. (2019). Analisis Kinerja pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Jurnal Pemikiran Dan Pemikiran Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 162.
- Danuri dan Siti Maisaroh. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan. Penerbit Samudra Biru.
- Emilya Gusmita. (2023). Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Serumpun Pauh Kabupaten Kerinci. EBISMA: Economics, Business, Management, & Accounting Journal, 3(1), 73.
- Eprilianto. (2022). Analisis E-Readiness Pemerintah Desa Dalam Pengembangan e-Monografi Desa. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(2), 189–204.
- Ibrahim, L. (1985). Pengertian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen. Ghalia Indonesia.
- Indrawati, S. (2017). Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Tanggulangin. Jurnal Kultur Demokrasi, 5, 4.
- Kansil, C. (2019). Hukum Administrasi Daerah. Jala Permata Aksara.
- Lisnawati. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(2), 21.
- Moleong, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Melli Puspita Lestari. (2022). Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. E-Journal Ilmu Pemerintahan, 10(3), 606.
- Priansa. (2019). Manajemen Kinerja Kepegawaian Dalam Pengelolaan SDM Perusahaan. Pustakan Setia.
- Rahmawati Anisa Dwi dan Didik G. Suharto. (2024). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 4(1), 73.
- Sidik Priadana dan Denok Surnasih. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Pascal Books Redaksi.
- Sinambela. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. Bumi Aksara.
- Syafrida Hafni Sahir. (2022). Metodologi Penelitian.
- Sugiyono, 2012 dan 2018. Metode Penelitian Bisnis. Alfabetta, Bandung.
- Andri wahyudi. (2022). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Suatu Tinjauan Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 34.
- Budi Setiawan, Ahmad Farhani. (2019). Analisis Kinerja pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Jurnal Pemikiran Dan Pemikiran Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 162.
- Emilya Gusmita. (2023). Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Serumpun Pauh Kabupaten

- Kerinci. EBISMA: Economics, Business, Management, & Accounting Journal, 3(1), 73.
- Eprilianto. (2022). Analisis E-Readiness Pemerintah Desa Dalam Pengembangan e-Monografi Desa. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 189–204.
- Indrawati, S. (2017). Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Tanggulangin. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5, 4.
- Lisnawati. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 21.
- Melli Puspita Lestari. (2022). Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 606.
- Rahmawati Anisa Dwi dan Didik G. Suharto. (2024). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(1), 73.